

**DAMPAK KEBIJAKAN PUPUK SUBSIDI TERHADAP KESEJAHTERAAN
PETANI DI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SARAH AMALIA
NIM. 180801045
Jurusan Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Amalia
NIM : 180801045
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 September 2022
Yang Menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAL
TEMPEL
51AJX90709417V

Sarah Amalia

**DAMPAK KEBIJAKAN PUPUK SUBSIDI TERHADAP KESEJAHTERAAN
PETANI DI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

SARAH AMALIA

NIM . 180801045

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II


Muhammad Thalal, Lc., M.S, M.Ed
NIP. 197810162000032004


Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc.
NIDN. 2007017903

DAMPAK KEBIJAKAN PUPUK SUBSIDI TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Satu Beban Studi Program

Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

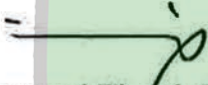
Pada Hari/Tanggal :


Selasa, 04 Oktober 2022
08 Rabiul Awal 1444

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Muhammad Thalal, Lc., M.S, M.Ed
NIP. 197810162000032004


Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc.
NIDN. 2007017903

Penguji I,

Penguji II,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP.198401012015031003


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP.198605132019031006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh,




Dr. Muji Mulja, S. Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Pidie dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Salah satu tujuan dari kebijakan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk membantu meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif supaya diperoleh data secara alamiah (natural) dan menyeluruh sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pupuk subsidi cukup berdampak positif terhadap kesejahteraan petani, hal ini dapat dilihat dengan terbantunya rumah tangga petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu kebijakan pupuk subsidi juga dapat membantu meringankan biaya produksi petani. Namun dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi pemerintah mengalami beberapa tantangan yaitu minimnya kuota pupuk subsidi sehingga terjadinya berbagai asumsi kelangkaan terhadap pupuk subsidi, kemudian terjadinya kemacetan dalam proses pendistribusian di tingkat Kios/Pengecer sehingga pengalokasian menjadi tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: *Dampak, Kebijakan, dan Pupuk Subsidi*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Pidie” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Thalal, Lc., M.S, M.Ed selaku pembimbing I dan Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa

penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Ila, Aripa, Afa, Wirna, Nisa dan Syawal yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018 Sarah Sundari, Rafifah Munifah, Nailis Wildany, Maula Mastura serta teman-teman penulis yang lain. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga Perekonomian dan SDA Pak pon, Pak Wan, Pak Wani, Bang iky, Kak Ina, Kak Ita yang telah banyak membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.
9. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.
Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 21 September 2022

Penulis,

Sarah Amalia
NIM. 180801045

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAAHAN PEMBIMING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Kebijakan	14
2.2.2 Kebijakan Pupuk Subsidi	23
2.2.3 Kesejahteraan Petani	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Informan Penelitian	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Profil Kabupaten Pidie	39

4.1.1	Kependudukan.....	39
4.2.1	Ketenagakerjaan.....	40
4.3.1	Pertanian.....	41
4.4.1	Pendapatan Regional.....	42
4.2.	Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani	44
4.2.1.	Meningkatkan Daya Beli Petani.....	44
4.2.3.	Meringankan Biaya Produksi Petani.....	51
4.3.	Tantangan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi	55
4.3.1.	Terjadi Kelangkaan Pupuk Subsidi Akibat Minimnya Kouta Pupuk Subsidi	55
4.3.2.	Macetnya Pendistribusian Pupuk Subsidi di Lini IV	57
4.3.3.	Transisi Pengelolaan Sawah Sehingga Petani Tidak Terdaftar di RDKK.....	62
BAB V	PENUTUP.....	69
5.1.	Kesimpulan.....	69
5.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah,¹ mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Pemerintah mempunyai berbagai fungsi diantaranya ialah fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Fungsi alokasi (*allocation branch*) ialah fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik (*public needs*). Fungsi distribusi (*distribution branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.

Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan/produksi pertanian, dan menjadikan Indonesia sebagai Negara mandiri pangan

¹ Winarmo Budiman 2012: Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS, Jogjakarta, hlm. 20.

yaitu Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama produk pertanian. Hal ini tertera dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2011 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Dalam mengawasi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) (SK Gubernur Aceh No. 520.34/797/2017) yang di ketuai Sekda Aceh dan beranggotakan unsur terkait. Hal ini juga tercantum juga dalam keputusan Bupati Pidie Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Pidie 2021 dan didalamnya juga tercantum bahwa salah satu tugas dari KP3 ialah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini III dan Lini IV serta penggunaan pupuk pestisida ditingkat petani.

Kebijakan terkait pupuk bersubsidi mempunyai tujuan penting dan strategis, yaitu untuk meningkatkan produksi pangan. Tujuan yang lebih besar lagi yaitu tercapainya target swasembada dan kedaulatan pangan, selain meminimalisir biaya usaha tani serta pendapatan petani. Tujuan peningkatan produksi dan pencapaian swasembada pangan tersebut relevan, jika mencermati keberhasilan peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas lainnya, bahkan telah tercapainya swasembada beras. Produksi padi tahun 2016 sebesar 79,14 juta ton atau naik 4,96% dibandingkan

tahun 2015², total produksi padi di Indonesia pada 2019 sebesar 54,60 juta ton , atau mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton (7,76 %) dibandingkan tahun 2018 dengan total sebesar 56,54³. Jika melihat pada data tersebut maka dapat kita lihat bahwa produksi padi hasil panen mengalami penurunan dari tahun ketahun.

Mekanisme pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi didasari pada keputusan Kementerian pertanian dengan menggunakan data RDKK sebagai basis data dalam menentukan target penerima pupuk subsidi. Dari akumulasi data tersebut Kementan dapat mengetahui jumlah volume dan jenis pupuk bersubsidi secara nasional dan provinsi sebagai agrersi dan jenjang-jenjang dibawahnya.

Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi diawali dengan melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Kemudian dilakukannya Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didampingi Penyuluh Pendamping mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 untuk selanjutnya diupload pada sistem e-RDKK. Kemudian dilakukan penyusunan regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi melalui Permentan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian

² <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1886>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

³ <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/21930121d1e4d09459f7e195/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020.⁴

Penerima manfaat dari kebijakan pupuk bersubsidi ialah petani. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, diperlukan sejumlah alokasi dan kombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produksi pertanian (output). Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama yang sangat menentukan dalam peningkatan

⁴ <https://www.masgunawan.id/program/baca/alokasi-pupuk-bersubsidi>, diakses pada 09 November 2021

produktivitas usahatani tanaman pangan. Dalam konteks itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui kebijakan yang mencakup aspek: teknis, penyediaan dan distribusi, maupun harga melalui subsidi.

Dimulainya kebijakan pupuk subsidi yaitu pada awal tahun 1969 sebagai salah satu kebijakan yang menjadi kiblat pertama kebijakan subsidi dalam bidang pertanian di Indonesia. Pada tahun anggaran 2019, pagu subsidi pupuk sebanyak 9.550.000 ton atau setara dengan Rp 29,9 triliun baik untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK maupun organik⁵. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam kebijakan pertanian. Kebijakan pemerintah yang cenderung terus meningkatkan subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor pertanian, khususnya pada subsektor tanaman pangan.

Dari segi pembangunan pertanian, pupuk menjadi salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem usaha tani. Pupuk merupakan salah satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian. Yang berarti karena tanpa pupuk, penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marjinal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah.

⁵ . Anonim, 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/23/150000826/sah-dpr-setujui-anggaran-2019-kementan-sebesar-rp-21-1-triliun->, diakses pada tanggal 07 November 2021

Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah agraris yang sebagian besar penduduknya berkerja di sektor pertanian, hal ini juga yang menandakan bahwa Kabupaten Pidie merupakan daerah agraris dengan padi yang menjadi fokus produksi utamanya. Di Kabupaten Pidie pertanian merupakan sektor utama karena tanaman pangan masih sangat banyak digeluti oleh masyarakat. Salah satu tanaman pangan yang diproduksi di Kabupaten Pidie adalah padi sawah, padi sawah menjadi fokus utama pencariannya juga pada sektor pertanian. Perkembangan luas panen dan produksi padi sawah sejak tahun 2017 – 2020 di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah di Kabupaten Pidie 2017-2020

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (ton/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	47.561	284.026,37	5,89
2018	40.781,14	259.042,12	6,35
2019	40.051,96	248.059,62	6,19
2020	38.887,61	246.564,18	6,34

Sumber: BPS Kabupaten Pidie 2021

Selama kurun waktu 2017-2020 luas panen padi disawah cenderung mengalami peningkatan dan terjadinya penurunan pada tahun 2018-2020 yang disertai dengan naik turunnya angka produksi. Angka produksi sawah di kabupaten pidie terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2020. Produksi padi 2018 yaitu sebesar 259.042,12 yang

mengalami penurunan sebanyak 24.984 ton atau 8,8% dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar 284.026,37.

Kabupaten Pidie merupakan salah kabupaten penghasil padi sawah di Provinsi Aceh dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Akan tetapi hasil produksi padi sawah dari 2017 ke tahun-tahun berikutnya justru mengalami penurunan produksi pada tahun 2020. Dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Kautsar dkk dari Universitas Syiah Kuala, produktifitas hasil tani sangat dipengaruhi oleh kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di Kecamatan Montasik telah menyebabkan menurunnya tingkat produktifitas hasil tani. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Idrasari Mahasiswa Universitas Jember, juga disebutkan bahwa kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Mumbulsari menyebabkan usahatani padi mengalami perbedaan produktivitas yang sangat nyata sebesar -4,082 artinya adanya penurunan tingkat produktivitas usahatani, usahatani jagung juga mengalami perbedaan yang sangat nyata sebesar -4,794, sedangkan usahatani tembakau perbedaan produktivitas sebesar -3,440. Hal ini dikarenakan keterlambatan dalam pemberian pupuk urea pada komoditi sehingga menyebabkan produksi yang dihasilkan menjadi menurun.

Dari penelitian-penelitian tersebut didapati bahwa faktor utama penurunan produksi padi sawah yang dihasilkan terjadi oleh kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga petani tidak dapat memaksimalkan pemupukan pada tanaman padi. Konsistennya hasil produksi padi yang dicapai bukan hal mudah akan tetapi,

dibutuhkan berbagai faktor pendukung agar dapat berhasil. Salah satu peran pemerintah adalah memberikan subsidi pada sektor pertanian guna mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman padinya, tersedia dengan harga yang terjangkau.

Dapat dilihat bahwa begitu penting dan strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya adalah subsidi pupuk. Kebijakan pemberian subsidi pupuk telah berlangsung selama bertahun-tahun dan disetiap tahunnya anggaran yang lunurkan cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Namun, dalam pelaksanaannya program pupuk subsidi juga tidak luput dari permasalahan di antaranya adalah kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, melonjaknya harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antar wilayah.

Kemudian keefektivan pelaksanaan program subsidi sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan karena selama ini subsidi dinilai tidak tepat sasaran dalam proses penyalurannya. Selain itu, mekanisme pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) ternyata menuai kritik dari banyak kalangan karena dianggap hanya menguntungkan pihak produsen, bukan kepada petani sebagai kelompok yang menjadi sasarannya. Permasalahan lain dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak sorotan adalah masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk sehingga

hampir setiap tahun terjadi kelangkaan pupuk dalam musim tanam. Dengan kondisi ini maka tulisan ini bertujuan melihat pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk dan dampak dari kebijakan pupuk subsidi untuk mensejahterakan petani.

Meningkatkan kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia secara umum merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata adalah amanat konstitusi sehingga sudah semestinya menjadi tujuan akhir pembangunan pertanian sepanjang masa. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait dampak kebijakan pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani, dengan kata lain judul penelitian ini adalah **“Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Pidie”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana dampak kebijakan pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi?

1.3 Tujuan Penelitian

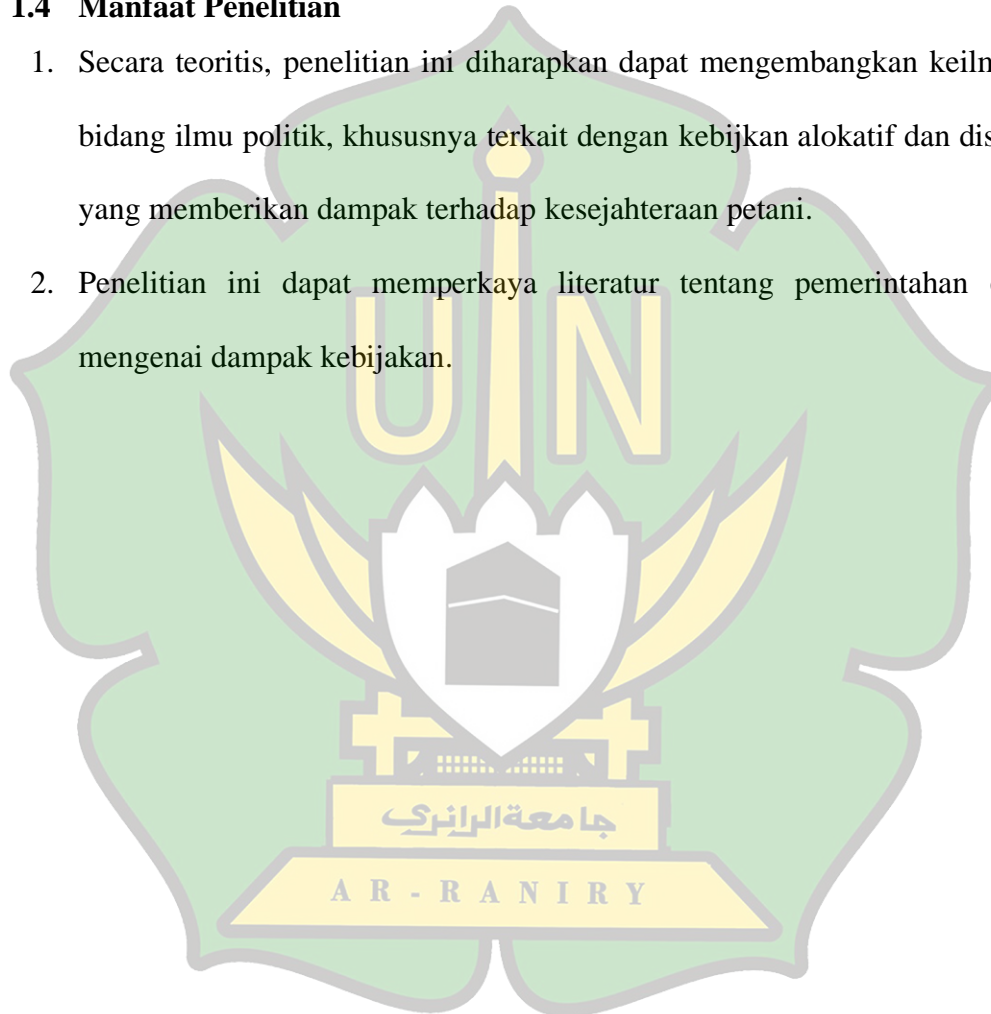
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut bagi kesejahteraan petani

2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang ilmu politik, khususnya terkait dengan kebijakan alokatif dan distributif yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.
2. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pemerintahan empiris mengenai dampak kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Pertama, Jurnal dari Kautsar dkk mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (Oryza Sativa) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*” pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait kelangkaan pupuk subsidi di Kecamatan Montasik, mulai dari dampak kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi, faktor-faktor yang berpengaruh dan berperan dalam kelangkaan pupuk, dan pengaruh penggunaan pupuk subsidi yang mengalami kelangkaan terhadap produktivitas padi petani. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di Kecamatan Montasik menyebabkan tidak tepatnya jumlah pupuk subsidi yang tersedia, tidak tepatnya penggunaan jenis pupuk subsidi SP-36 dan ZA yang digunakan oleh petani, dan tidak tepatnya waktu dalam pendistribusian pupuk subsidi. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan pupuk subsidi di Kecamatan Montasik adalah realisasi pupuk lebih rendah dari usulan RDKK oleh petani, dosis pemakaian pupuk yang tidak sesuai anjura oleh petani, pola distribusi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, kemampuan pengelolaan.

Kedua, Jurnal dari Tanjung dkk yang berjudul “*Kajian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dan Harga Pupuk Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten*

Batubara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Batubara. Pengaruh variasi ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi terhadap produksi padi adalah sebesar 66,7 %. Ketersediaan pupuk bersubsidi secara rata-rata di Kabupaten Batubara adalah sebesar 94,56%. Secara parsial, ketersediaan pupuk bersubsidi berpengaruh negatif terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Batubara. Kondisi disebabkan sebagian petani ada yang memperoleh pupuk bersubsidi lebih dari yang dibutuhkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian petani memperoleh pupuk dalam jumlah yang lebih banyak dari kebutuhan, tetapi sebagian petani lainnya masih kekurangan dari jumlah yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Batubara.

Ketiga, Skripsi dari Muhlisin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “*Pengaruh Kelangkaan Pupuk Subsidi Terhadap Produktivitas Dan Pendapatan Usahatani Padi Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kelangkaan pupuk terhadap produktivitas padi terdapat perbedaan antara produktivitas yang mengalami kelangkaan pupuk lebih rendah dalam produktivitas dengan nilai sebesar 7.981 kg/ha sedangkan produktivitas yang tidak mengalami kelangkaan hasilnya lebih tinggi produktivitas dengan nilai sebesar 9.325 kg/ha. Kemudian pengaruh kelangkaan pupuk terhadap pendapatan usahani padi terdapat perbedaan antara

pendapatan yang mengalami kelangkaan pupuk hasilnya lebih rendah pendapatannya dengan nilai sebesar Rp 23.463.357 sedangkan yang tidak mengalami kelangkaan pupuk pendapatan lebih tinggi dengan nilai sebesar Rp 29.755.676.

Keempat, Skripsi dari Motik Indrasari Mahasiswa Universitas Jember yang berjudul “*Dampak Kelangkaan Pupuk Urea Bersubsidi Terhadap Sikap Petani Dan Produktivitas Usahatan*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap petani pada usahatani padi dan jagung tidak mengurangi penggunaan pupuk urea walaupun adanya kelangkaan pupuk, begitu pula dengan petani tembakau mereka tidak mengurangi penggunaan pupuk urea. Sikap petani dalam penggunaan pupuk urea pada usahatani padi, jagung, dan tembakau dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya modal, pendapatan, pengalaman, umur, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, sarana komunikasi dan harga pupuk. Hal ini terlihat bahwa petani tetap penggunaan pupuk urea. Kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Mumbulsari menyebabkan usahatani padi mengalami perbedaan produktivitas yang sangat nyata sebesar -4,082 artinya adanya penurunan tingkat produktivitas usahatani, usahatani jagung juga mengalami perbedaan yang sangat nyata sebesar -4,794, sedangkan usahatani tembakau perbedaan produktivitas sebesar -3,440. Hal ini dikarenakan keterlambatan dalam pemberian pupuk urea pada komoditi sehingga menyebabkan produksi yang dihasilkan menjadi menurun.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan dengan istilah *policy*. Hal ini terjadi dikarenakan sampai saat ini belum diketahui pasti terjemahan yang tepat untuk istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Apa itu *policy* atau kebijakan? Donovan dan Jackson dalam Keban menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu product, dan sebagai kerangka kerja. Dilihat dari segi konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rujukan; sebagai suatu proses, kebijakan dilihat sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar untuk merumuskan isu-isu dan carayang digunakan untuk proses pengimplementasian.⁶

James E. Anderson yang dikutip oleh Wahab juga menyampaikan rumusan kebijakan sebagai sifat dari berbagai aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan adalah suatu tindakan yang menjurus pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

⁶ Ryant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003), h. 158

tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan⁷

Kebijakan merupakan kemandirian, kepintaran, kebijaksanaan dan rangkaian konsep awal yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang Pemerintah, Organisasi dan lain-lain) prasyarat cita-cita, tujuan atau maksud dengan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk sampai pada sasaran, garis haluan.⁸

Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

- 1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
- 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.⁹

Sedangkan definisi kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Winarmo adalah arah perbuatan yang memiliki maksud yang sudah ditentukan oleh seorang aktor

⁷ Solichin Abdul Wahab, Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 4

⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007),.

⁹ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 16

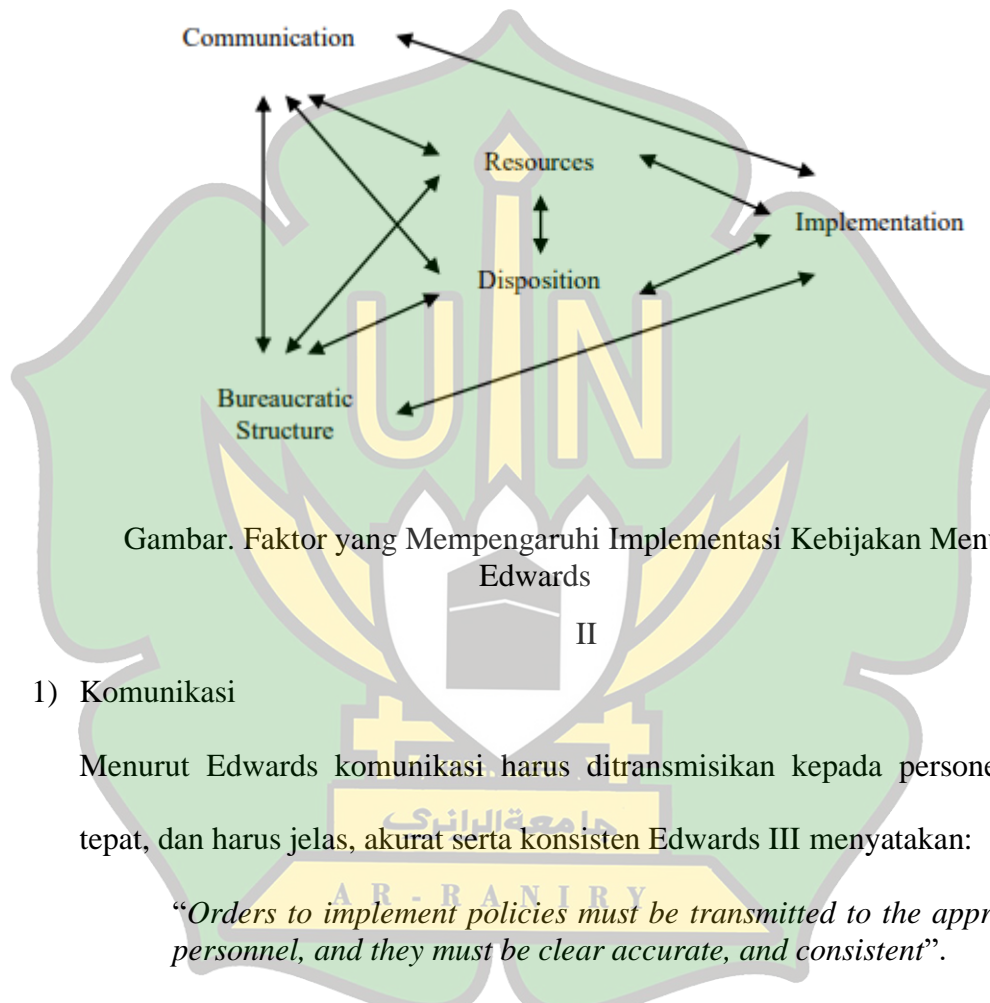
dalam mengatasi suatu persoalan atau suatu masalah.¹⁰ Konsep Kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada yang sebenarnya dikerjakan bukan pada apa yang dimaksudkan atau diusulkan. Menurut Anderson konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi. *Pertama*, kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh sejumlah aktor yang terlibat dalam sistem politik. *Kedua*, Kebijakan bukan merupakan keputusan sendiri-sendiri melainkan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. *Ketiga*, Kebijakan ialah apa sebenarnya yang diatur oleh pemerintah bukan apa yang diinginkan pemerintah. *Keempat*, Kebijakan publik mungkin bisa bersifat positif maupun negatif.¹¹

Dalam sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pelaksanaan kebijakan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya. Subarsono (2005: 89) menyebutkan beberapa teoritis implementasi kebijakan yang menyebutkan berbagai macam variabel tersebut. Salah satunya ialah George C. Edwards III.

¹⁰ Winarmo, Op.Cit., h.21

¹¹ *Ibid.* hlm 23-24.

Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.



Gambar. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Edwards

1) Komunikasi

Menurut Edwards komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III menyatakan:

“Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent”.

Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan/decision maker berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaknya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/discretion pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum

menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas serta spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

2) Sumber Daya

Mengenai sumber daya, Edwards III (1980: 11) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah:

Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.

Tanpa memandang seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards, sebagaimana disebutkan di atas meliputi staff, informasi, otoritas, dan fasilitas.

3) Disposisi

Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III menyatakan:

“If implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors’ attitudes or perspectives differ from the decisionmakers’, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”.

Dalam hal ini Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan.

4) Birokrasi

Faktor keempat yang dikemukakan Edwards adalah struktur birokrasi. Edwards III menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

Mengenai SOP, Edwards III menjelaskannya sebagai:

“The former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”.

Jika kita rephrase, SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada

organisasi pelayanan publik. Standarisasi SOP sudah menjadi isu lama pada organisasi swasta/private sector, dan kemudian diimplementasikan pula pada organisasi-organisasi pelayanan publik.

Untuk lebih memahami kebijakan maka perlu mengkaji tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik. Untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.

Dunn menyatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam analisis kebijakan, yaitu pendekatan empiris, evaluative dan normatif. Pendekatan empiris berupaya menjawab permasalahan fakta-fakta pendekatan evaluatif berupaya mencari beberapa nilai atas sesuatu, dan pendekatan normatif memberikan upaya tindakan atas apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan prosedur analisis tindakan kebijakan ini bertujuan akhir pada pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengataasi permasalahan tersebut. Untuk itu analisis kebijakan akan memperkirakan apa yang akan terjadi apabila alternatif yang dipilih ditetapkan untuk dilaksanakan, memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian apa yang harus dilakukan serta dampak apa yang akan terjadi dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, apabila tidak

dilakukan alternatif kebijakan tersebut maka tantangan yang akan terjadi baik kondisi politik, sosial, dan budaya apabila kebijakan itu tidak dilaksanakan. Kemudian analisis kebijakan mendeskripsikan kebijakan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sehingga diperoleh gambaran apa kekurangan dari kebijakan yang telah dilakukan dan apa kelebihan dari kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga diperoleh alternatif yang tepat. Melalui evaluasi kebijakan akan diperoleh gambaran sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

William N. Dunn dalam Nanang Fattah merangkum analisis kebijakan melalui lima tahap sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah Kebijakan Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.¹² Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternative, dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, dan otorisasi pengaturan arahan-arahan.¹³

2. Meramalkan Alternatif Kebijakan (Prediksi)

¹² Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Th. 2013, cet. II, h. 5

¹³ *Ibid*, hal.54

Para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang, setelah itu menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.¹⁴

3. Merekomendasikan Penerapan Kebijakan (Preskripsi)

Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.¹⁵

4. Monitoring Kebijakan (Deskripsi)

Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik.³ Monitoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Sehingga hasil informasi

¹⁴ *Ibid*, hal.55

¹⁵ Nanang Fattah, *Op. Chit*, Hal.55

tentang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan tersebut.¹⁶

5. Mengevaluasi Kinerja Kebijakan Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakebut yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran.

2.2.2 Kebijakan Pupuk Subsidi

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, pupuk dipandang sangat penting untuk disubsidi. Dilihat dari segi historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET).¹⁷

¹⁶ Nanang Fattah, *Op. Chit*, Hal.203

¹⁷ Syafa'at, N., A. Purwoto, M. Maulana, dan C. Muslim. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.(Bogor:2006)

Subsidi pupuk disalurkan dalam bentuk dana yang tersedia yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai:

1. tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan
2. tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Dalam rangkuman Susila, tentang kebijakan subsidi pupuk antara lain:

- (i) Pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut;
- (ii) Untuk merespons kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani;
- (iii) Kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk memenuhi prinsip enam tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Resultannya adalah subsidi pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.¹⁸

Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk:

¹⁸ Susila, W.R. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. Jurnal Litbang Pertanian 29(2): 43-4

1. Memberikan kemudahan dan jaminan kepada Kelompok Tani/Petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.
2. Memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien bagi PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya/Produsen, Distributor, dan Pengecer untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani/Petani.
3. Menanamkan persepsi bahwa pupuk bersubsidi bukan komoditi yang bebas diperdagangkan, sehingga dapat menghindari pola pikir pelaku usaha yang memperlakukan pupuk bersubsidi sebagai komoditi untuk mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan kebutuhan pupuk untuk Kelompok Tani/Petani.
4. Menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi ke sektor yang tidak sesuai peruntukannya.

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia secara historis mengalami beberapa kali perubahan. Pada periode 1970-1993, sistem subsidi yang diberlakukan adalah subsidi harga dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN. Pada periode ini, pupuk yang disubsidi adalah harga pupuk yang berasal dari impor dan pupuk produksi dalam negeri. Periode 1999-2001, dikarenakan pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, maka subsidi harga pupuk dicabut dan sistem subsidi harga diganti menjadi subsidi harga bahan baku untuk pembuatan pupuk yakni subsidi gas. Pada Periode 2003- 2005, sistem subsidi yang berlaku merupakan kombinasi subsidi gas dan subsidi harga.

Saat ini, pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sistem distribusi pupuk bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah (pusat dan kabupaten/kota).

Mekanisme pembagian kewenangan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Permendag mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV.
2. Permentan mengatur alokasi pupuk bersubsidi per provinsi serta pengaturan system Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RKK).
3. Peraturan Gubernur mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten
4. Peraturan Bupati/Walikota mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan

Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih menimbulkan banyak permasalahan. Dari aspek penerima manfaat, petani masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Bahkan, petani kerap kali merasakan kelangkaan pupuk. Selain itu, harga pupuk berada diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditemukannya masalah penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) bekerja sama dengan USAID yang dilakukan di sepuluh daerah di Indonesia, dilaporkan bahwa implementasi kebijakan subsidi pupuk selama periode 2009-2011 masih banyak menemui kendala dan permasalahan terutama pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran/distribusi, serta pengawasan.

Pada aspek pendataan, permasalahan yang ditemukan adalah tidak validnya data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di mana terdapat penggelembungan (*mark up*) luas lahan dan jumlah petani. Sementara pada aspek penganggaran, ditemukan audit yang mengoreksi jumlah perhitungan subsidi karena masih terdapatnya sejumlah pupuk *delivery order* (DO) yang belum disalurkan. Selain itu dalam penghitungan subsidi, masih terdapat biaya-biaya yang tidak termasuk komponen-komponen produksi dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang dijadikan sebagai dasar perhitungan nilai subsidi pupuk.

Pada aspek penyaluran, ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak terpasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO, keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, serta terdapat beberapa pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat provinsi maupun kabupaten belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mereka dinilai tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan pengawasan, serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan.

2.2.3 Kesejahteraan Petani

Sebelum membahas kesejahteraan petani, tentu harus memahami dahulu tentang pengertian kesejahteraan. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah

“aman, sentosa, dan makmur”.¹⁹ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kesejahteraan yakni hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.²⁰ Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu *Catera* yang berarti payung. Artinya adalah yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Menurut undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.²¹

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup

¹⁹ W.J.S Poerwadarmita, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung: Mizan, 1996), h

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 534

²¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 13

substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial. Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut.

Dalam Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, secara semantik, kesejahteraan adalah hal atau keadaan sehat, damai, sejahtera, bahagia. Sejahtera berarti terpenuhinya segala kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis dan sipiritual. Kebutuhan biologis mungkin dapat diukur berdasarkan kemampuan untuk memperoleh segala kebutuhan material agar dapat hidup sehat dan produktif. Kebutuhan psikologis, sosiologis dan sipiritual, berkaitan dengan relasi sesama manusia dan Tuhan, bersifat subyektif dan tidak dapat dipenuhi dengan barang material semata. Dengan pengertian demikian, kesejahteraan berkenaan dengan perasaan tentang status kebaikan kebahagiaan atau kepuasan hidup yang bersifat dan subyektif dan kualitatif, tidak dapat diukur langsung. Oleh karena itu, kesejahteraan biasanya diukur dengan indikator atau penanda yang berkorelasi erat dengan kebaikan, kebahagiaan atau kepuasan hidup.

Sunarti (2006) mengatakan bahwa kesejahteraan keluarga petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Secara sederhana keluarga petani dikatakan sejahtera manakala dapat memenuhi kebutuhan dasar

anggotanya. Namun jika merujuk UU No 10 Tahun 1992 (UU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera), keluarga sejahtera dimaknai secara luas yaitu: “keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. Mengingat luas dan lebarnya rentang kualitas kebutuhan dasar individu dan keluarga, maka dalam definisi operasionalnya, kesejahteraan Pengukurannyapun seringkali hanya dilakukan secara objektif, padahal kesejahteraan menyangkut aspek persepsi individu atau keluarga terhadap kondisi pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Friedlander dalam Suud (2006:8) mengemukakan bahwa Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Midgley masih dalam Suud (2006:5) menjelaskan bahwa: Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Itu adalah, pertama,

setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Kesejahteraan keluarga petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Secara sederhana keluarga petani dikatakan sejahtera manakala dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya.²²

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam hal pengentasan kemiskinan mengingat sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Salah satu faktor penyebab besarnya angka kemiskinan adalah rendahnya pendapatan yang diterima sebagai akibat rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dengan upah riil yang diterima juga rendah.

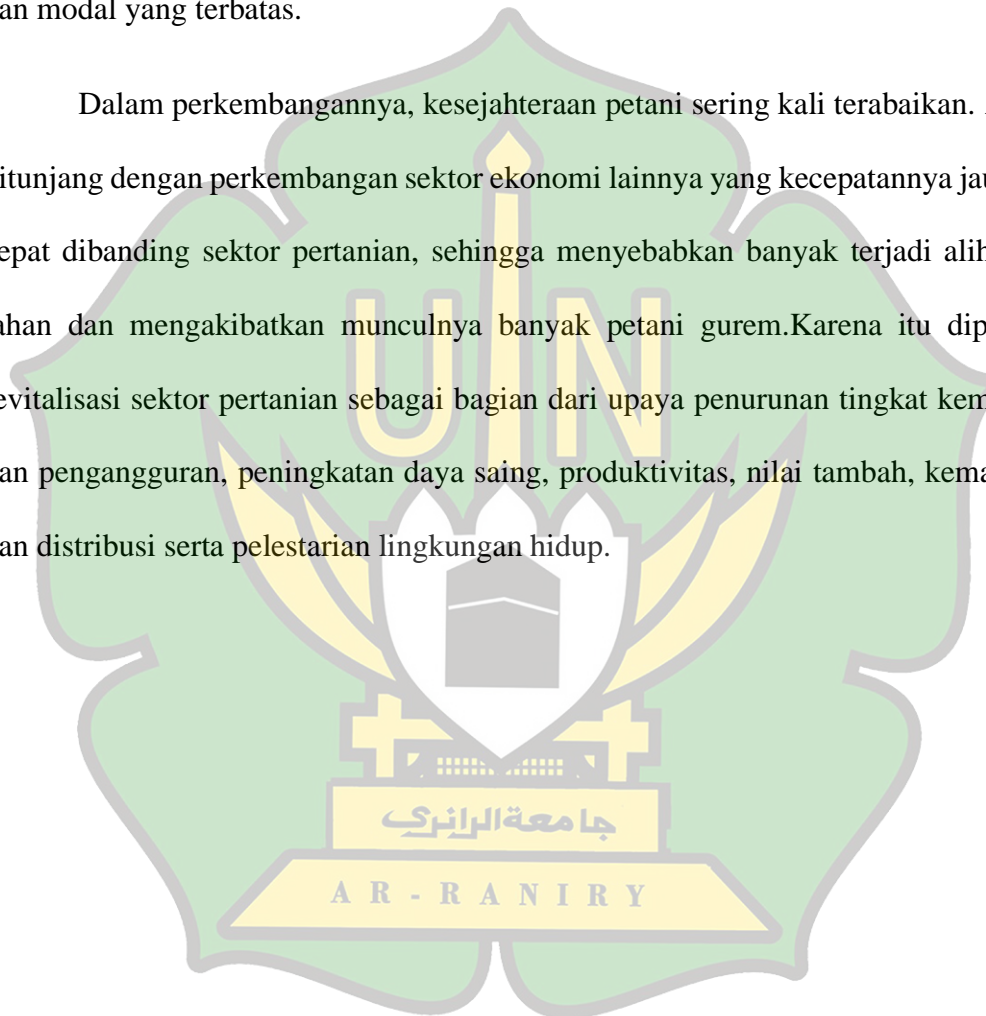
Sebagian besar rumah tangga petani mempunyai kemampuan mengalokasikan pendapatan terhadap total pengeluaran/konsumsi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai aspek yang menunjang peningkatan sektor pertanian dan non pertanian.²³ Disamping itu diperlukan kebijakan harga komoditas pertanian yang

²² Sunarti E. 2006. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya [Naskah Akademis]. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

²³ Sugiarto, 2008. Patanas: Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.

layak diterima petani dengan pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan, serta didorong oleh iklim usaha di luar pertanian yang lebih kondusif, sehingga dapat diperoleh manfaat bagi rumahtangga petani sebagai penyedia tenaga kerja, aset lahan dan modal yang terbatas.

Dalam perkembangannya, kesejahteraan petani sering kali terabaikan. Apalagi ditunjang dengan perkembangan sektor ekonomi lainnya yang kecepataannya jauh lebih cepat dibanding sektor pertanian, sehingga menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan dan mengakibatkan munculnya banyak petani gurem. Karena itu diperlukan revitalisasi sektor pertanian sebagai bagian dari upaya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah, kemandirian dan distribusi serta pelestarian lingkungan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak diperkenankan memisahkan suatu individu atau kelompok ke dalam suatu variabel maupun suatu hipotesis, tetapi perlu dipandang sebagai suatu keutuhan. Berdasarkan deskripsi di atas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif supaya diperoleh data secara alamiah (natural) dan menyeluruh sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan dan bukan merupakan hasil manipulasi maupun rekayasa karena tidak ada variabel atau unsur yang mengontrol.²⁴

3.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Kecamatan Kembang Tanjong Kab. Pidie)”

²⁴ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),82

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan pada Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dikarenakan untuk mengetahui dampak dari kebijakan pupuk subsidi terhadap kesejahteraan petani.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan ini akan dilakukan pada kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie untuk melihat dampak dari kebijakan dari pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani.

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang disajikan dalam bentuk bahan untuk menyusun informasi. Data adalah segala informasi yang diolah untuk kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.²⁵ Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

²⁵ Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta,Sukses Offset,2010), 175

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya.²⁶ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa data primer dan data sekunder diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data sekunder juga diharapkan dapat mempertegas teori dari kesenjangan praktek yang peneliti lakukan.

3.5 Informan Penelitian

Informan ialah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami

²⁶ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39

²⁷ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, 39.

bagai data, informasi, maupun peristiwa yang terjadi dari subjek objek penelitian. Penentuan informan kunci ditetapkan saat memasuki lapangan dari selama penelitian berlangsung atau dikenal dengan desain *emergent sampling* karena sample atau informan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan sebelumnya. Adapun Informan penelitian saya terdiri dari Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab Pidie, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, dan Petani.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview) جامعة البراني

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pengelola pantai, masyarakat pemilik usaha di sekitar pantai dan pengunjung pantai dengan tujuan mengajukan suatu pertanyaan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.²⁸ Metode ini peneliti gunakan untuk menggali sumber-sumber dan data yang berkaitan dengan kesejahteraan petani.

3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Untuk menilai apakah data-data yang diperoleh itu sudah valid maka perlu digunakan teknik triangulasi dalam proses pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang secara geografis terletak antara 40 30' – 40 60' Lintang Utara dan 95 0 75' – 96 0 20' Bujur Timur. Di sebelah utara Kabupaten Pidie berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Ibukota Kabupaten Pidie adalah Kota Sigli yang berjarak 112 km dari Kota Banda Aceh. Luas wilayah Kabupaten Pidie sebesar 3.184,45 Km² atau sekitar 6,27 persen dari total luas wilayah daratan Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie terdiri dari 23 kecamatan dimana wilayah terluas berada di Kecamatan Tangse yaitu seluas 786,58 Km². Dari sejumlah 731 desa yang ada di Kabupaten Pidie, sebanyak 690 desa atau sebesar 94,4 persen merupakan daerah bukan pesisir, sementara sisanya 41 desa merupakan desa di daerah pesisir.

4.1.1 Kependudukan

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pidie sebanyak 435.275 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 215.878 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 219.397 jiwa berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 98,39, artinya setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 98-99 penduduk laki-laki. Namun jika ditelaah lebih lanjut, untuk kelompok umur muda (0-4, 5-9, 10-14, 15-19) sex ratio setiap kelompok umur lebih dari 100, yang artinya lebih banyak penduduk usia muda

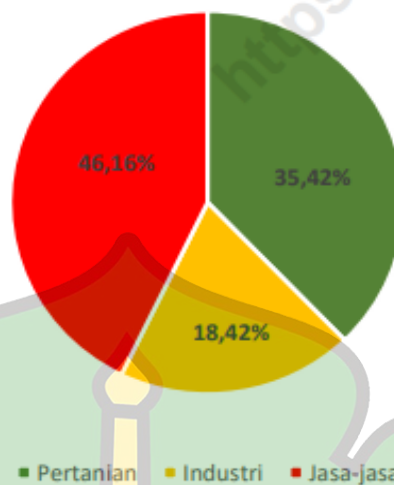
di Kabupaten Pidie yang berjenis kelamin lakilaki. Dari segi kepadatan penduduk, dengan luas wilayah 3.184,45 Km², kepadatan penduduk di Kabupaten Pidie adalah sebanyak 137 jiwa/km².

Uraian	Satuan	2020
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk	jiwa	435.275
Laki-laki	jiwa	215.878
Perempuan	jiwa	219.397
Pertumbuhan Penduduk	persen	1,35
Kepadatan Penduduk	jiwa/km ²	137
Rasio Jenis Kelamin	persen	98,39
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur		
0-14 tahun	persen	25,03
15-64 tahun	persen	68,06
>65 tahun	persen	6,91

Tabel 2. Sumber data BPS Provinsi Aceh, 2021

4.2.1 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pidie adalah sebanyak 187.284 orang dari 335.036 orang penduduk usia kerja atau sebanyak 60,29 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Nilai TPAK ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 65,55 persen pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif mengalami penurunan. Dari total jumlah penduduk angkatan kerja, sebesar 92,72 persen bekerja dan sisanya menganggur.



Gambar 1. Sumber Data Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Aceh, Agustus 2021

4.3.1 Pertanian

Kabupaten Pidie dikenal sebagai daerah agraris dengan produksi utamanya adalah padi. Pada tahun 2020, produktivitas tanaman padi di Kabupaten Pidie mencapai 6,34 ton/ha. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang mencatat produktivitas sebesar 6,19 ton/ha dan pada tahun 2018 yang mencapai 6,35 ton/ha. Selain padi, di sektor tanaman pangan dapat terlihat nilai produksi kacang hijau pada tahun 2019, yaitu sebesar 543 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 256 ton. Selanjutnya untuk jagung, pada tahun 2020 tercatat produksi jagung 409 ton mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 480 ton.

Uraian	2018	2019	2020
Luas Panen (Ha)	40.781	40.052	38.887
Produksi (Ton)	259.042	248.059	246.564
Produktivitas (Ton/Ha)	6,35	6,19	6,34

Tabel 3. Sumber Data Pidie Dalam Angka, 2021

4.4.1 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor produksi dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB ini disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Pidie pada periode 2015-2019 berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,35 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar 4,43 menjadi -0,14. Hal ini tidak terlepas dari imbas adanya efek pandemi Covid-19 di tahun 2020.



Gambar 2. Sumber data Pidie Dalam Angka, 2021

Gambar di atas menunjukkan empat kategori ekonomi yang memiliki peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pidie. Distribusi Persentase PDRB menurut lapangan usaha di Pidie menunjukkan kategori pertanian masih merupakan kontributor utama pada komposisi PDRB dengan share sebesar 41,06 persen dengan pertumbuhan sebesar 3,17 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor yang memiliki peranan sebesar 14,27 persen dengan pertumbuhan sebesar -5,05 persen dan diikuti kategori dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. dengan kontribusi sebesar 10,54 persen dan pertumbuhan sebesar -4,62 persen. Penyumbang terbesar keempat tahun 2020 adalah sektor konstruksi sebesar 7,46 persen terhadap PDRB Kabupaten Pidie dengan pertumbuhan sebesar 12,73 persen. Sedangkan sisanya disumbang oleh 13 kategori ekonomi lainnya.

4.2. Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani

Salah satu tujuan dari kebijakan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk membantu meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan. Kedudukan pupuk yang amat penting dalam produksi pertanian mendorong campur tangan pemerintah untuk mengatur tata niaga pupuk. Kebijakan pemerintah terkait masalah ini adalah melalui subsidi. Subsidi pupuk yang diberlakukan sejak tahun 1971 bertujuan menekan biaya yang akan ditanggung petani dalam pengadaan pupuk. Dampak kebijakan pupuk bersubsidi terhadap petani telah memberikan dampak positif diantaranya ialah :

4.2.1. Meningkatkan Daya Beli Petani

Salah satu tujuan dari kebijakan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk membantu meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan sehingga dapat mencapai peningkatan pada kesejahteraan petani yang merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian.

Kesejahteraan keluarga petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Secara sederhana keluarga petani dikatakan sejahtera manakala dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya.

Pupuk subsidi membantu petani dalam meningkatkan daya beli petani karena dengan tersedia pupuk subsidi maka cost yang seharusnya dikeluarkan petani untuk membeli pupuk berkurang karena harga pupuk subsidi yang terjangkau sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini juga disebutkan dalam wawancara saya dengan beberapa petani:

Petani I :

“Ini sudah pasti, dengan harga yang lebih murah kami para petani dapat menggunakan sisa uangnya untuk belanja keperluan sehari-hari seperti ikan, sayur-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian dengan murahnya harga pupuk subsidi dapat membantu memenuhi biaya sekolah anak-anak, seperti membeli perlengkapan sekolah mereka dan biaya-biaya tidak terduga lainnya, dan bagi kami para petani kecil apapun yang dapat meringankan biaya produksi dapat membantu dalam membantu biaya kehidupan rumah tangga.”²⁹

Petani II:

“Iya, meskipun tidak sepenuhnya namun dengan murahnya harga pupuk ini cukup membantu untuk menambah-nambah biaya sekolah anak jika diperlukan. Sedangkan untuk biaya kehidupan rumah tangga sehari-hari ini sangat membantu menurut saya dengan harga yang jauh lebih terjangkau saya dapat membelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sehubungan dengan biaya listrik sendiri saya mendapatkan harga subsidi jadi jika dengan harga pupuk lebih murah itu juga sangat membaantu.”³⁰

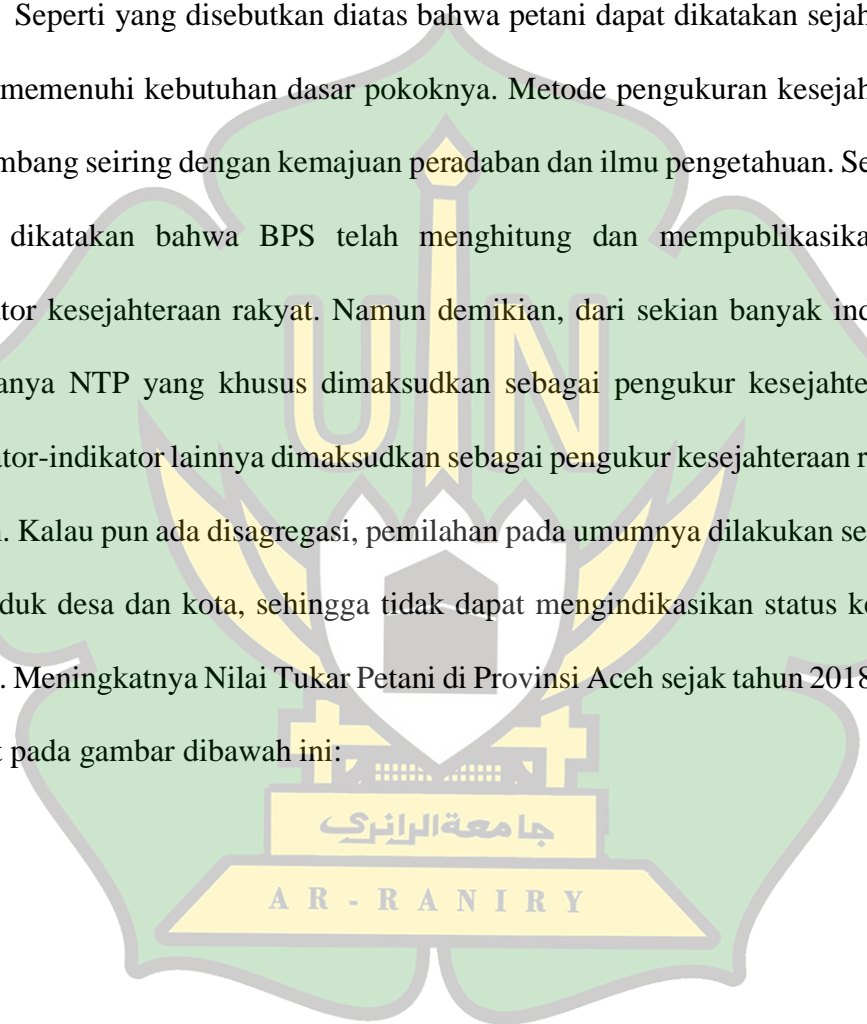
Berdasarkan pernyataan para petani diatas bahwa dengan tersedianya pupuk subsidi maka petani dapat membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun tidak dapat membantu secara menyeluruh namun bagi para petani

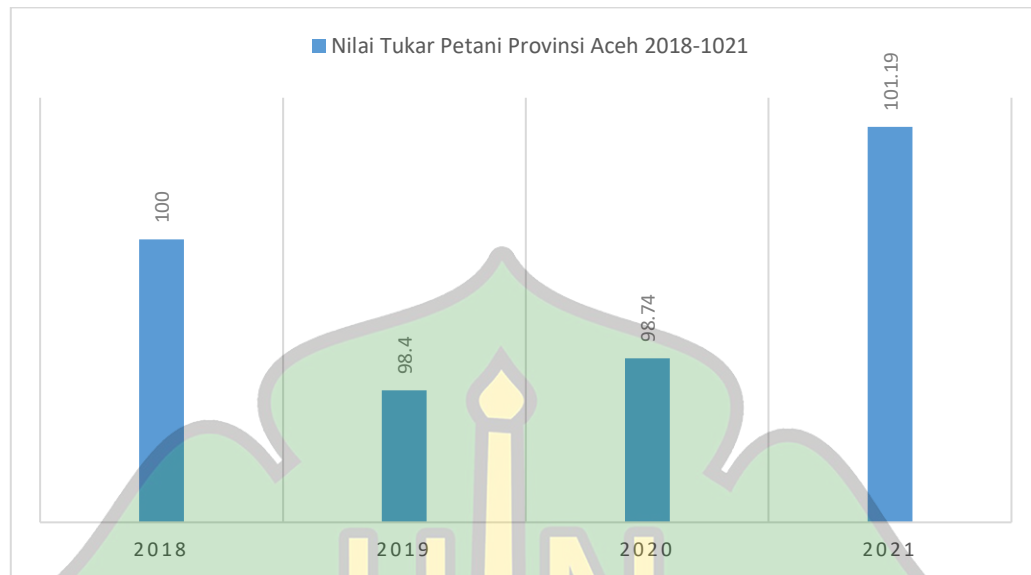
²⁹ Wawancara dengan Petani I, pada tanggal 2 Juni 2022

³⁰ Wawancara dengan Petani II, pada tanggal 2 Juni 2022

hal tersebut sudah sangat memadai dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, cost yang seharusnya dibayar petani untuk biaya produksi padi dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh petani karena tersedianya pupuk subsidi.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa petani dapat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhan dasar pokoknya. Metode pengukuran kesejahteraan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa BPS telah menghitung dan mempublikasikan sejumlah indikator kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dari sekian banyak indikator yang ada hanya NTP yang khusus dimaksudkan sebagai pengukur kesejahteraan petani. Indikator-indikator lainnya dimaksudkan sebagai pengukur kesejahteraan rakyat secara umum. Kalau pun ada disagregasi, pemilahan pada umumnya dilakukan secara spasial, penduduk desa dan kota, sehingga tidak dapat mengindikasikan status kesejahteraan petani. Meningkatnya Nilai Tukar Petani di Provinsi Aceh sejak tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





Gambar 3. Sumber BPS Kabupaten Pidie

Selama tahun 2018 hingga 2020, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh menunjukkan angka di bawah 100, yang berarti bahwa rata-rata NTP pada tahun 2019-2020 tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018. Namun selama tahun 2019 sampai 2021 rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) tahunan Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan, Peningkatan Rata-Rata NTP pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,35 sedangkan peningkatan Rata-Rata NTP pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,48. Hal ini menunjukkan membaiknya parameter daya beli dan kesejahteraan petani. Peningkatan rata-rata tahunan NTP dari 2019 hingga tahun 2020 disebabkan meningkatnya NTP beberapa Subsektor Tanaman termasuk didalamnya ialah tanaman pangan yaitu padi.

4.2.2. Meningkatkan Produktivitas Padi

Kabupaten Pidie merupakan daerah agraris dengan produksi utamanya adalah padi. Sehingga pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan terutama tanaman padi. Salah satu tujuan pupuk subsidi ialah untuk memenuhi prinsip enam tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Resultannya adalah subsidi pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie mengatakan :

“Jadi dengan adanya pupuk bersubsidi pasti membantu petani, karena pada dasarnya harga pupuk bersubsidi itu sudah diatur oleh pemerintah, sehingga dengan harga yang telah ditetapkan dan pastinya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga yang non-subsidi memang sangat membantu petani.”³¹

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa pupuk subsidi sangat berdampak bagi para petani, dikarenakan harga pupuk subsidi jauh lebih terjangkau sehingga dapat membantu meringankan beban petani dari segi perekonomian dan juga penggunaan pupuk subsidi diharapkan juga dapat meningkatkan produktivitas padi, hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh ibu Fitri Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie mengatakan:

³¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, pada tanggal 20 Mei 2022

“Terkait dengan masalah produktivitas padi sudah pasti juga berdampak, karena dengan adanya pupuk bersubsidi kurang lebih juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pupuk non-subsidi. Namun kouta pupuk subsidi hanya di alokasin 25-30% dari kebutuhan petani sehingga jumlahnya yang terbatas tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan petani, kemudian petani tetap harus atau membutuhkan pupuk non-subsidi. Jadi harus diimbangi antara pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi.”³²

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa pupuk bersubsidi juga memiliki dampak positif terhadap produktivitas padi, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari kebijakan pupuk subsidi agar dapat meningkatkan produktivitas padi. Namun pupuk subsidi memiliki kouta yang terbatas dikarenakan pupuk subsidi hanya dialokasikan 25-30% dari 100% kebutuhan petani, sehingga petani juga membutuhkan pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan. Perkembangan produktivitas padi di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Luas Panen, Produksi Padi Sawah di Kabupaten Pidie 2017-2020

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	47.561,00	284.026,37	5,89
2018	40.781,14	259.042,12	6,25
2019	40.051,96	248.059,62	6,09
2020	38.887,61	246.564,18	6,11

Sumber: BPS Kabupaten Pidie 2021

³² *Ibid*, hal 40

Selama kurun waktu 2017-2020 produksi padi disawah cenderung mengalami peningkatan dan terjadinya penurunan pada tahun 2018-2020 yang disertai dengan naik turunnya luas lahan pertanian. Angka produksi sawah di kabupaten pidie terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2020. Produksi padi 2018 yaitu sebesar 259.042,12 yang mengalami penurunan sebanyak 24.984 ton atau 8,8% dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar 284.026,37. Namun jika merujuk pada luas panen yang juga menurun maka angka produksi yang menurun bukanlah sebuah kemerosotan melainkan angka produksi yang turun juga diakibatkan oleh luas panen yang juga menurun ditiap tahunnya.

Naiknya angka produksi tentunya dipengaruhi oleh berbagai indikator salah satu indikator utamanya ialah pupuk, Sehingga program kebijakan fiskal sangat diperlukan dalam rangka agar terpenuhinya kebutuhan pupuk petani dengan harga murah dan mudah didapat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa petani yang menjadi responden dalam penelitian ini :

Petani I

“Pupuk bersubsidi tentu dapat menjamin produktivitas padi, meskipun pupuk subsidi ini tidak dapat menjamin produktivitas padi secara 100% atau secara keseluruhan karena pupuk subsidi juga terbatas, terkadang sudah musim tanam namun pupuk subsidinya tidak tersedia, sehingga kami para petani harus membeli pupuk non-subsidi”³³

³³ Ibid, hal 37

Petani II

“Tentunya, pupuk bersubsidi juga memiliki pengaruh terhadap produktivitas padi, karena pupuk subsidi ini bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. Namun para petani tetap harus membeli pupuk non-subsidi dikarenakan pupuk subsidi adalah barang dengan kouta terbatas.”³⁴

Petani III

“Tentu saja pupuk subsidi ini memiliki pengaruh terhadap produktivitas padi, meskipun petani tidak dapat bergantung 100% pada pupuk subsidi, namun pupuk subsidi juga adalah salah satu harapan kami para petani dalam membantu meringankan biaya ekonomi apalagi petani kecil seperti kami, sebagai petani penyewa lahan pupuk subsidi cukup membantu menurut saya.”³⁵

Berdasarkan pendapat beberapa petani diatas dapat disimpulkan bahwa pupuk subsidi mempunyai peran serta pengaruh terhadap produktivitas padi, meskipun pupuk subsidi hanya dialokasikan sebesar 25-30% dari 100% kebutuhan petani secara keseluruhan namun dengan adanya pupuk subsidi dapat membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas padi dan kesejahteraan petani.

Oleh karena itu meningkatkan kesejahteraan petani secara umum merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian kesejahteraan petani adalah juga bagian dari instrumen pembangunan pertanian. Petani yang lebih sejahtera, lebih memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Dipandang demikian, maka kesejahteraan memiliki nilai intrinsik dan nilai instrumental sehingga sudah semestinya dijadikan sebagai prioritas utama tujuan pembangunan pertanian.

4.2.3. Meringankan Biaya Produksi Petani

³⁴ *Ibid.* hal 37

³⁵ Wawancara dengan Petani III, pada tanggal 1 Juni 2022

Program kebijakan pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang berlaku untuk diberikan kepada petani yang memiliki kartu, sehingga harga pupuk sudah terjamin dapat dijangkau oleh petani yang terdaftar didalam RDKK. Pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana harga pupuk bersubsidi harus sesuai dengan yang tertera dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Nomor 01 Tahun 2021:

Tabel 6. Jenis Pupuk, Harga Eceran Tertinggi , dan Harga/Sak Pupuk Bersubsidi

Jenis Pupuk	Harga Eceran Tertinggi (HET)	Harga/Sak
Pupuk Urea	Rp. 2.250,- per kg	Rp. 122.500 (@50 Kg)
Pupuk SP-36	Rp. 2.400,- per kg	Rp. 120.000 (@50 Kg)
Pupuk ZA	Rp. 1.700,- per kg	Rp. 85.000 (@50 Kg)
Pupuk NPK	Rp. 2.300,- per kg	Rp. 115.000 (@50 Kg)
Pupuk Organik	Rp. 800,- per kg	Rp. 32.000 (@50 Kg)

Tabel 7. Jenis Pupuk dan Harga Pupuk Non-Subsidi

Jenis Pupuk Non-Subsidi	Harga (Rp)
Pupuk Urea Non-subsidi	355.000 per 50 kg
Pupuk SP-36 Non-subsidi	340.000 per 50 kg
Pupuk ZA Non-subsidi	295.000 per 50 kg
Pupuk NPK Mutiara Non-subsidi	575.000 per 50 kg
Pupuk NPK Pak Tani Non-subsidi	650.000 per 50 kg
Pupuk KCL Mahkota Non-subsidi	550.000 per 40 kg

Berdasarkan Tabel 6 dan 7 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan harga antar pupuk bersubsidi dengan pupuk non-subsidi. Pupuk Urea bersubsidi per sak memiliki harga sebesar Rp. 122.500 sedangkan pupuk Urea non-subsidi memiliki harga Rp. 355.000 sehingga pupuk subsidi jauh lebih murah sekitar 65% dan ini membuktikan bahwa harga pupuk subsidi jauh lebih terjangkau untuk para petani dalam mendongkrak perekonomian petani.

Ketepatan harga dalam pelaksanaan program subsidi pupuk dapat meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Tujuan lain dari pemerintah menetapkan adanya pupuk bersubsidi bagi petani adalah agar tidak ada persaingan harga sehingga petani dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh produsen.

Adapun berdasarkan penjelasan diatas hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada Ibu Fitri Selaku Kepala Seksi Pupuk:

“Jadi dengan adanya pupuk bersubsidi pasti membantu petani, karena memang harga pupuk bersubsidi itu sendirikan sudah di atur oleh pemerintah, jadi memang dengan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang subsidi memang sangat membantu petani”

Hasil wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa program kebijakan pupuk subsidi ini dapat membantu petani dikarenakan harga pupuk subsidi jauh lebih

terjangkau daripada pupuk non-subsidi. Hal ini juga didapat dilihat dalam hasil wawancara dibawah ini dengan beberapa petani yaitu:

Petani I

“Produktivas padi sangat dipengaruhi oleh pupuk sehingga pupuk subsidi juga salah satu penentu produktivitas padi. Dan pupuk subsidi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan petani, meskipun petani tidak dapat bergantung 100% pada pupuk subsidi, namun pupuk subsidi juga adalah salah satu harapan kami para petani dalam membantu meringakan ekonomi”.³⁶

Petani II

“Produktivas padi sangat dipengaruhi oleh pupuk sehingga pupuk subsidi juga salah satu penentu produktivitas padi. Dan pupuk subsidi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan petani, meskipun petani tidak dapat bergantung 100% pada pupuk subsidi, namun pupuk subsidi juga adalah salah satu harapan kami para petani dalam membantu meringakan ekonomi”.

³⁷

Petani V

“Menurut saya kebijakan pupuk bersubsidi ini lumayan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, karena pupuk subsidi dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dan pastinya itu sudah membantu biaya petani”.³⁸

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa pupuk subsidi merupakan salah satu komponen penting bagi para petani, karena dengan harga pupuk subsidi yang lebih terjangkau petani sangat merasa terbantu dalam hal pembiayaan modal, meskipun petani memahami bahwa pupuk subsidi tidak dapat memenuhi kebutuhan secara

³⁶ *Ibid.* hal 37

³⁷ *Ibid.* hal 37

³⁸ Wawancara dengan Petani V, pada tanggal 4 Juni 2022

menyeluruh dikarenakan tidak cukupnya kouta pupuk secara keseluruhan namun dengan kouta yang hanya dialokasikan sekitar 25-30% sudah cukup berdampak positif terhadap kesejahteraan petani.

4.3. Tantangan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi pemerintah mengalami tantangan sebagai berikut:

4.3.1. Terjadi Kelangkaan Pupuk Subsidi Akibat Minimnya Kouta Pupuk Subsidi

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran produksi pertanian, Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, Salah satu diantaranya ialah subsidi pupuk. Pemberian subsidi pupuk bertujuan agar petani dapat mengakses kebutuhan pupuk untuk usaha taninya dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian guna tercapainya ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Namun

alokasi pupuk subsidi yang diberikan pemerintah ternyata tidak mencapai dari 100% kebutuhan petani, hal ini dapat dilihat berdasarkan pada gambar dibawah ini :

Tabel.8 Subsidi Pupuk 2022

Jenis Pupuk	Kebutuhan Subsidi (Kg)	Kouta Subsidi (Ton)
UREA	17.102.572	8.850
SP 36	24.341	20
ZA	24.850	24
NPK	18.160.380	5.320
ORGANIK	37.108.390	1.250

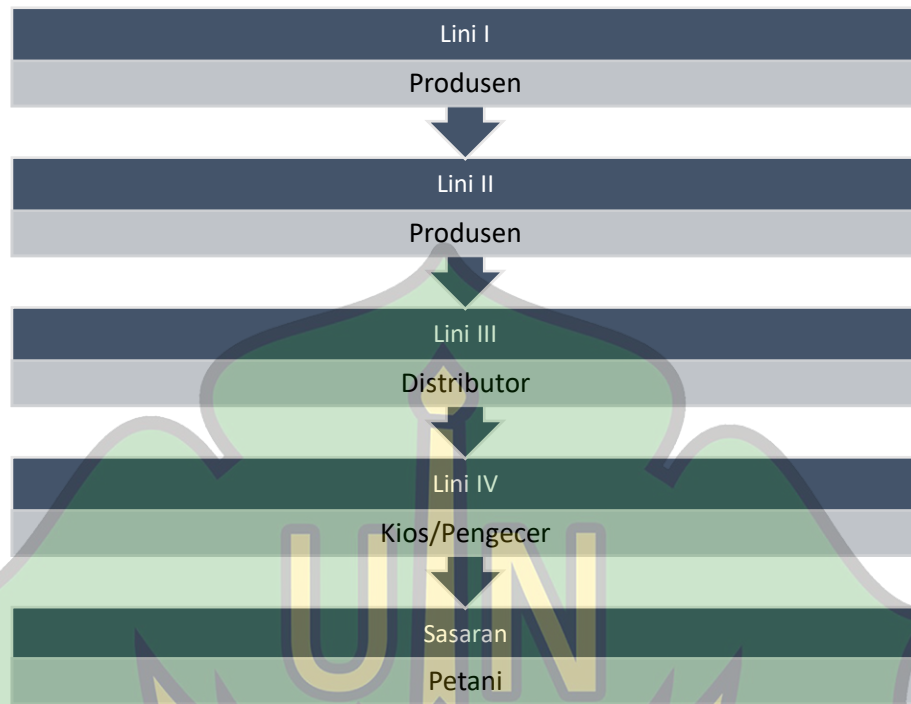
Tabel yang terdapat diatas merupakan data pupuk bersubsidi di Kabupaten Pidie tahun 2022. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan subsidi dengan alokasi pupuk subsidi memiliki gambaran perbedaan yang jelas bahwa antara pupuk yang dibutuhkan petani dan pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah tidak mencapai secara keseluruhan kebutuhan petani. Hal dapat dilihat bahwa jumlah pupuk jenis urea yang dibutuhkan yaitu sebesar 17 ton sedangkan pupuk subsidi yang dialokasikan hanya hanya 8.8 Ton, Kemudian pupuk jenis NPK yang dibutuhkan sebanyak 18 Ton sementara pupuk subsidi jenis NPK yang alokasi hanya sebanyak 5 Ton. Dan bisa dilihat juga pada pupuk jenis Organik yang dibutuhkan sebanyak 37 Ton sedangkan pupuk subsidi jenis Organik yang dialokasikan hanya sebesar 12 Ton. Ketiga pupuk ini merupakan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh semua petani secara keseluruhan di Kabupaten Pidie karena terlihat dari jumlah ketiga pupuk ini yang

paling banyak dibutuhkan dan dialokasikan sehingga hanya ketiga pupuk tersebut yang dibutuhkan oleh semua Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pidie. Berdasarkan penjabaran diatas dapat kita pahami bahwa pupuk subsidi memiliki kouta terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan.

Keterbatasan anggaran menyebabkan kuota subsidi pupuk selalu di bawah kebutuhan sesuai dengan e-RDCK. Untuk tahun 2021 misalnya, alokasi anggaran yang disediakan APBN hanya sebesar Rp25,276 triliun untuk 9,04 juta ton ditambah 1,5 juta liter untuk pupuk organik cair. Sementara kebutuhan menurut e-RDCK mencapai 23,2 juta ton atau dalam rupiah sebesar Rp67,12 triliun. Selisihnya terpaut jauh. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata penggunaan pupuk urea, SP36, ZA, NPK 15-15-15, NPK Formula Khusus, dan Organik, alokasi 2021 juga masih lebih rendah. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, rata-rata penggunaan pupuk secara volume sebesar 9,123 juta ton, dengan total anggaran Rp 32,58 triliun atau lebih tinggi dibanding pagu alokasi 2021.

4.3.2. Macetnya Pendistribusian Pupuk Subsidi di Lini IV

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor.



Gambar 5. Proses Pendistribusian pupuk subsidi

Dalam peraturan tersebut dinyatakan kalau produsen bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi di gudang Lini II sampai Gudang di Lini III. Penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke pengecer atau Lini IV merupakan tanggung jawab dari Distributor, sedangkan penyaluran dari Lini IV atau pengecer ke kelompok tani menjadi tanggung jawab pengecer (Gambar 5). Penyaluran ke kelompok tani ini berpedoman kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie pada awal tahun dan diberlakukan selama satu tahun. Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Fitri dalam wawancaranya:

*“Kalo kendalanya ada, kendalanya kadang pupuknya ada, pupuknya tersedia dikios tapi ternyata petaninya engga butuh. Kios menebus pupuk juga pakai modal, kadang kios ekonominya juga belum stabil karena untuk pembayaran pupuk subsidi sendirikan sekarang pake aplikasi E-verval dan itu berjenjang juga E-verval di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Sampai ke Pusat. Jadi setelah di verifikasi oleh tim pusat itu baru mereka dibayar pupuk subsidi. Jadi salah satu alasannya karena keterlambatan pembayaran, kemudian penebusannya juga kadang tidak sesuai dengan masa tanam. Keterlambatan penebusan dari petani ke kios ada, dari distributor ke kios juga ada. Jadi masalahnya ini enggak ketebak gitu, kadang masalahnya di Kios kadang masalahnya di petani gitu. Dari pemerintah tidak ada keterlambatan, selalu ada stock di gudang tinggal di tebus aja”.*³⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa proses pendistribusian pupuk subsidi memiliki tahapan yang panjang dengan berbagai kendala dilapangan sehingga terkadang terjadinya keterlambatan ketersediaan pupuk subsidi di tingkat pengecer dikarenakan penebusan pupuk ke distributor tidak segera dilakukan akibat kekurangan modal.

Untuk menentukan tingkat keefektifan dari suatu kebijakan subsidi pupuk adalah indikator tepat waktu. Indikator tepat waktu yang dimaksud adalah pupuk bersubsidi yang akan selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh petani dengan kata lain bahwa tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi ketika petani akan membutuhkan pupuk tersebut. Namun sebaliknya, jika indikator tepat waktu tidak dapat direalisasikan dalam proses pendistribusian maka akan terdapat berbagai kendala dilapangan seperti terjadinya kelangkaan pupuk, dan melonjaknya harga pupuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Irwan Selaku Kasubag SDA Setda Kab. Pidie:

³⁹ *Ibid.* hlm 40

*“Kebijakan pupuk subsidi di Pidie disalurkan/ didistribusikan sesuai dengan aturan yang berlaku, dari distributor ke kios pengecer sehingga masyarakat dapat menikmati pupuk subsidi sesuai dengan harga yang terjangkau dn tepat sasaran. Selama ini proses pendistribusian pupuk ke petani berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun kkendalanya kadang-kadang tidak sesuai antara musim tanam dan alokasi pupuk. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kelangkaan adalah mahalnya harga pupuk dan produktivitas padi menurun”.*⁴⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pupuk mempunyai peran penting dalam menjamin produktivitas padi, meskipun pemerintah telah mengupayakan kebijakan pupuk bersubsidi ini di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku namun kendala tidak tepat waktu ini dapat muncul karena berbagai faktor salah satunya ialah kemacetan distribusi pupuk yang dapat menyebabkan tidak sesuainya dengan prinsip tepat waktu. Hal ini juga dapat dilihat pada gamabr dibawah

⁴⁰ Wawancara dengan Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian & SDA Setda Kab. Pidie, pada tanggal 20 Mei 2022

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 07 Januari 2021

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULANAN**

Dalam Satuan Ton

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	UREA	8.000,00	676,00	711,00	574,00	504,00	261,00	637,00	667,00	596,00	709,00	875,00	899,00	887,00
2	SP 36	18,00	4,00	9,50	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZA	12,00	5,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NPK	6.000,00	1.003,00	1.012,00	887,00	553,00	193,00	210,00	317,00	270,00	324,00	369,00	410,00	452,00
5	ORGANIK	780,00	175,00	153,00	116,00	93,00	42,00	69,00	-	-	82,00	50,00	-	-
JUMLAH PUPUK		14.810,00	1.865,00	1.892,50	1.581,50	1.190,00	496,00	916,00	984,00	868,00	1.033,00	1.326,00	1.359,00	1.339,00

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN PIDIE
Ir. BOFYAN
Pembina Tk. I / NIP. 0641231 199603 1 025

Gambar 6. Alokasi pupuk bersubsidi pertanian tahun anggaran 2012

Gambar diatas merupakan daftar alokasi pupuk sektor pertanian di Kabupaten Pidie anggaran tahun 2021, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa alokasi pupuk dilakukan disetiap bulannya. Jika merujuk kepada musim tanam yang tidak serentak dan masa tanam yang dilakukan 2 kali dalam kurun waktu setahun maka alokasi pupuk yang tidak sesuai dengan masa tanam bukan kemustahilan.

4.3.3. Transisi Pengelolaan Sawah Sehingga Petani Tidak Terdaftar di RDKK

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman khususnya pada pasal 6 ayat 2, yang isinya petani berkewajiban berperan serta dalam rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman. Kemudian untuk memperkuat agar tidak disalahgunakan, maka pemerintah mengeluarkan Perpres No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi merupakan Barang dalam Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/Ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.⁴¹

RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN. Dalam pelaksanaan penyusunan RDKK mengacu kepada RDK (Rencana Definitif Kelompok) masing-masing kelompok dengan tahapan sebagai berikut: (1) pertemuan pengurus kelompok tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK; (2) pertemuan anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua Kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian untuk membahas, menyusun dan menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu). RDKK selesai paling lambat 1 bulan sebelum

⁴¹ Darwis dan Supriyati (2013). Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

jadwal tanam; dan (3) meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh Ketua kelompok tani yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian.⁴²



Dokumen RDKK yang telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan PPL dikirim ke Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota dan produsen pupuk yang melayani wilayah tersebut. Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota membuat rekapitulasi kebutuhan pupuk per kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hasil rekapitulasi Dinas terkait di tingkat kabupaten kemudian dikirim ke Dinas Pertanian di tingkat provinsi untuk dibuat rekapitulasi per kabupaten/kota yang termasuk ke dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Hasil rekapitulasi di tingkat provinsi itu kemudian dikirim ke Pusat (Kementerian Pertanian).

⁴² *Ibid*

Dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi ketentuannya distributor memilih kios pengecer dan kemudian pupuk tersebut dibeli oleh petani yang sudah didata melalui RDKK. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Jafar selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie menyatakan:

*“Proses pendistribusian pupuk berjalan dengan baik, karena waktu pendistribusian pupuk dikios itu sekarang memakai aplikasi susah untuk penyimpangan, ada juga penyimpangan namanya juga pupuk ini pembisnis, kan tidak mungkin KP3 turun tiap hari turun ke lapangan. Dan petani hanya dapat membeli pupuk subsidi di Kios yang namanya tertera di Kelompok penerima Kios tersebut. Ada kelemahan kita, ada petani yang tidak terdaftar di RDKK, RDKK kan disusunnya pertahun, petani kitapun hanya petani penggarap jadi sering terjadi transisi pengelolaan sawah garap”.*⁴³

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa proses pendistribusian pupuk subsidi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana hanya petani yang terdaftar didalam RDKK yang dapat menerima pupuk subsidi, namun ternyata terdapat kelemahan dalam proses pendistribusian pupuk subsidi dimana beberapa dari petani merupakan petani penyewa sehingga jika terjadi masa transisi pengelolaan lahan sawah petani yang mengambil alih lahan selanjutnya tidak terdaftar didalam RDKK sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

Tugas dari KP3 adalah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpangan serta penggunaan pupuk bersubsidi, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari lini I sampai lini IV,

⁴³ Wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, pada tanggal 20 Mei 2022

maupun secara tidak langsung maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim KP3 kabupaten/kota.⁴⁴ Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Fitri dalam wawancaranya:

*“Masalah pengawasan kalo kita dikabupaten itu ada yang namanya KP3 Jadi disitu ada beberapa anggotanya, termasuk dinas pertanian, dinas Perdagangan, Polsek, Polres, dan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab.Pidie. Kadang kami melakukan sidak kekios, mengecek harga pupuknya apakah sesuai dengan HET atau tidak, kemudian mengecek penyalurannya mereka memenuhi Kouta sesuai di SK atau tidak”.*⁴⁵

Oleh karena itu dengan adanya RDKK diharapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi menjadi tertutup sebagai akhir saluran distribusi (kios) sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi lapangan. Artinya, penjualan pupuk bersubsidi oleh kios hanya kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan RDKK yang sudah direvisi berdasarkan alokasi pupuk. Demikian pula, petani hanya boleh membeli pupuk bersubsidi di kios terkait dan tidak boleh melebihi RDKK yang sudah revisi. Sistem pembayaran dari kios ke distributor dan dari distributor ke produsen adalah tunai. Hal ini juga disampaikan oleh ibu fiitri:

*“Proses pendistribusian pupuk berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan alokasi yang telah kita berikan. Kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan dilapangan karena untuk kabupaten Pidie sendiri itukan masa tanamnya enggak serentak, jadi penyaluran pupuk subsidi itu disesuaikan kebutuhan atau masa tanam di lapangan. Sebenarnya tidak langka tapi koutanya yang memang tidak cukup kemudian penerimanya juga udah ada jadi nanti ada RDKK, jika petani yang namanya tidak terdaftar di RDKK dia ga bisa mengambil pupuk subsidi”.*⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* hlm.54

⁴⁵ *Ibid.* hlm 40

⁴⁶ *ibid*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa hanya petani yang terdaftar didalam RDKK yang sudah disusun oleh kelompok tani yang dapat mengambil pupuk subsidi. Oleh karenanya untuk mencapai azas enam tepat (jumlah, jenis, kualitas, harga, waktu, tempat), secara teknis perlu dilakukan perbaikan khususnya pada peningkatan efisiensi biaya pokok produksi, penyiapan basis data melalui e-RDKK dan aspek pengawasan dengan mengoptimalkan peran KP3.

Analisis kebijakan menurut William N. Dunn didasarkan pada 5 tahap yaitu:

1) Perumusan Masalah Kebijakan

Masalah pertama program subsidi pupuk, yaitu kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, muncul karena kesulitan dalam membuat data yang akurat mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi. Prakiraan kebutuhan pupuk sering dibuat secara agregat dengan memperhitungkan luas tanam dan takaran pupuk secara umum. Kenyataannya, takaran penggunaan pupuk bervariasi, baik karena perbedaan luas lahan maupun tingkat kesadaran petani terhadap manfaat pupuk. Akibatnya, kebutuhan riil dengan ketersediaan pupuk sering berbeda nyata sehingga ada daerah yang kelebihan dan banyak yang kekurangan. Masalah kedua, yaitu penyelewengan pupuk bersubsidi merupakan akibat adanya dualisme pasar yang menciptakan insentif untuk melakukan penyelewengan distribusi

3. Dua masalah pertama yaitu ketidaksesuaian antara ketersediaan (volume subsidi) dan kebutuhan serta sasaran yang bias ke petani kaya/besar, secara umum dapat diperbaiki melalui mekanisme perencanaan yang lebih baik.

Dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, ada tiga hal yang perlu digarisbawahi, yaitu: 1) ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menyusun perencanaan, 2) pemberdayaan PPL, dan 3) ketersediaan waktu yang memadai untuk menyusun perencanaan.

3. Dalam mengatasi masalah tersebut adapun rekomendasi kebijakannya yaitu pilihan pertama adalah melanjutkan kebijakan subsidi pupuk dengan memperbaiki perencanaan, pemantauan, sistem distribusi, dan pemberdayaan penyuluh lapangan. Pilihan kedua adalah menggantikan kebijakan tersebut dengan kebijakan lain yang lebih efektif.
4. Ketersediaan sumber daya yang memadai dalam perencanaan merupakan sesuatu yang mutlak. Melihat kompleksitas permasalahan serta volume subsidi yang besar pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang cukup sehingga dapat disusun perencanaan yang matang dan komprehensif yang mencakup enam tepat, yaitu tepat jumlah, jenis, mutu, waktu, harga, dan tempat. Untuk itu, anggaran untuk perencanaan harus memadai. Jumlah petugas yang membuat perencanaan harus memadai dan tersedia insentif yang sesuai agar kualitas perencanaan lebih baik.
5. Melakukan penyuluhan penggunaan pupuk, Pendekatan pertama bersifat persuasif dengan terus meningkatkan penyuluhan takaran pupuk yang tepat. Penyuluhan sebaiknya diikuti demplotswadaya yang dilakukan di lahan petani. Lahan petani yang bisa dijadikan demplot dipilih lahan milik kontak tani andalan, ketua kelompok tani, atau petani yang progresif menerapkan teknologi

tepat guna. Pendekatan kedua adalah mewajibkan petani penerima pupuk bersubsidi untuk menggunakan pupuk dengan takaran tidak menyimpang terlalu jauh dari takaran anjuran.

6. Sebagai suatu program subsidi dengan target yang sangat luas, subsidi pupuk menghadapi berbagai masalah dan kendala sehingga menurunkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Paling tidak ada tiga masalah penting dalam program subsidi pupuk, yaitu: 1) penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, 2) kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan 3) bias sasaran/target.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian mengenai dampak kebijakan pupuk subsidi terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Pidie maka dapat disimpulkan:

1. Kebijakan terkait pupuk subsidi tertera dalam Peraturan Presiden No.77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Untuk mengawasi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) (SK Gubernur Aceh No. 520.34/797/2017) yang di ketuai Sekda Aceh dan beranggotakan unsur terkait. Hal ini juga tercantum juga dalam keputusan Bupati Pidie Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Pidie 2021
2. Dampak kebijakan pupuk subsidi ialah meningkatnya daya beli petani hal ini dapat dilihat dengan terbantunya rumah tangga petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu kebijakan pupuk subsidi juga berdampak pada meningkatnya produktivitas padi serta dapat membantu meringankan biaya produksi petani dikarenakan harga pupuk subsidi jauh lebih terjangkau sehingga sangat membantu petani dalam meringankan biayanya.

3. Dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi pemerintah mengalami beberapa tantangan yaitu minimnya kuota pupuk subsidi sehingga terjadinya berbagai asumsi kelangkaan terhadap pupuk subsidi, kemudian terjadinya kemacetan dalam proses pendistribusian di tingkat Kios/Pengecer sehingga pengalokasian menjadi tidak tepat sasaran.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah yang bekerjasama dengan pihak produsen pupuk, distributor, pengecer/kios dapat lebih mengoptimalkan lagi program penyaluran pupuk bersubsidi mengenai prinsip tepat jenis pupuk, tepat jumlah pupuk dan tepat waktu.
2. Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dapat mempertimbangkan pembaharuan RDKK dilakukan dua kali dalam setahun agar petani penyewa dapat mendaftarkan dirinya sebagai penerima pupuk subsidi.
3. Petani sebagai penerima manfaat harus memanfaatkan pupuk subsidi sebagaimana mestinya, terutama dalam pemakaian pupuk diharapkan dapat petani dapat dengan bijak dalam penggunaan agar tetap dapat menjaga produktivitas padi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG. Subarsono .2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. h. 16
- Departemen. 2011. *Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka. h. 534
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik* (akarta: Bumi Aksara
- Moh. Kasiram. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta : Sukses Offset
- Ryant Nugroho Dwijowijoto, 2013. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Solichin Abdul Wahab, 2007. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* , Jakarta : Bumi Aksara, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39
- Winarmo Budiman, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS, Jogjakarta
- W.J.S Poerwadarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung: Mizan, 1996).

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Indrasari, Motik “*Dampak Kelangkaan Pupuk Urea Bersubsidi Terhadap Sikap Petani Dan Produktivitas Usahatani*”. Skripsi. Universitas Jember.
- Darwis dan Supriyati 2013. *Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.
- Kautsar, M. R., Sofyan, S., & Makmur, T. (2020). *Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (Oryza sativa) di 65 Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1), 97-107.

- Muhlisin. 2016. *Pengaruh Kelangkaan Pupuk Subsidi Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Usaha tani Padi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiarto, 2008. *Patanas: Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*
- Susila, W.R. 2010. *Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali*. Jurnal Litbang Pertanian 29(2): 43-4
- Sunarti E. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya* [Naskah Akademis]. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
- Syafa'at, N., A. Purwoto, M. Maulana, dan C. Muslim. *Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya*. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.(Bogor:2006)
- Tanjung. A. N. Y., Lubis. Y., dan Lubis. S. 2020. *Kajian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dan Harga Pupuk Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Batubara*.Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis, 2(2) 2020: 208- 216

Regulasi

- Peraturan Presiden No.77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
- Peraturan Menteri Pertanian No.41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Anggaran Tahun 2022
- Peraturan Menteri Pertanian No.67/Permentan/SM.050/12/2016
- Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 13

Website

- Anonim, 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/23/150000826/sah-dpr-setujui-anggaran-2019-kementan-sebesar-rp-21-1-triliun->, diakses pada tanggal 07 November 2021
- <https://pidiekab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1886>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/21930121d1e4d09459f7e195/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022
<https://www.masgunawan.id/program/baca/alokasi-pupuk-bersubsidi>, diakses pada 09 November 2021



Draf Pertanyaan Wawancara

- **Pemerintah**

- Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab Pidie,
- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie
- Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, dan Masyarakat.

1. Bagaimana Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pidie
2. Apa dampak dari kebijakan pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani?
3. Seberapa besar pengaruh pupuk bersubsidi terhadap produktivitas padi?
4. Apakah dalam proses pendistribusian pupuk terjadinya keterlemabatan?
5. Apa dampaknya terhadap petani jika terjadi keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi?
6. Apakah kelangkaan pupuk subsidi dapat menghambat produktivitas padi?
7. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi?
8. Apa yang dilakukan pemerintah ketika terjadinya kelangkaan pupuk subsidi?
9. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi?
10. Apa tantangan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi?

- Masyarakat (Petani)

1. Apakah peran pupuk subsidi terhadap kesejahteraan petani?
2. Apakah pupuk bersubsidi dapat membantu meringankan biaya petani?
3. Apakah dengan adanya pupuk bersubsidi dapat menjamin produktivitas padi?
4. Apakah pupuk subsidi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan petani?
5. Apakah kelangkaan pupuk subsidi dapat menghambat produktivitas padi petani?
6. Apakah pupuk subsidi dijual dengan HET yang telah ditentukan?
7. Apakah petani mengalami kesulitan disaat terjadinya kelangkaan pupuk?
8. Sejauh mana dampak kebijakan pupuk bersubsidi terhadap kesejahteraan petani?
9. Apakah dengan adanya subsidi pupuk membantu meringankan biaya sekolah anak?
10. Apakah dengan adanya subsidi pupuk membantu meringankan biaya kehidupan sehari-hari?
11. Apakah dengan adanya subsidi pupuk dapat meringankan biaya listrik?
12. Apakah dengan adanya subsidi pupuk dapat memiliki uang untuk berobat jika sakit?

Lampiran 2

DATA PRIBADI

Nama : Sarah Amalia
 Tempat, Tanggal Lahir : Gp. Jurong Mesjid, 01 September 2000
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Jurong Mesjid, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie
 No Hp : 0895364526451
 Email : amaliyyasarah01@gmail.com



PENDIDIKAN

SD Negeri Jurong Mesjid	2006 – 2012
MTsN 3 PIDIE	2012 – 2015
MAN 7 PIDIE	2015 – 2018
Universitas Islam Negri Ar-Raniry	2018 – 2022

ORGANISASI

Anggota Himpunan Mahasiswa Politik	2019-2020
Anggota Rhoh Entertainment	2017-Sekarang
Wakil Ketua Divisi Pendidikan dan Keilmuawan DEMA FISIP UIN Ar-Raniry	2020-2021

PENGALAMAN

Magang	: Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie
KPM	: Gampong Jurong Mesjid Kec, Kembang Tanjong, Kab. Pidie

MOTTO HIDUP

“Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kamu tidak pernah tau bagaimana hasilnya jika kamu tidak pernah mencoba”.

Lampiran 3

Dokumentasi Dengan Narasumber

Wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Pidie



AR - RANIRY

Wawancara dengan Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Setda Kab. Pidie



Wawancara Dengan Kepala Seksi Pupuk, Peptisida dan Pembiayaan Pangan Pada Dinas Pertanian Pidie



Wawancara dengan Petani





- Peraturan Bupati



10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Pupuk;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/ Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) DI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten Pidie Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Tugas KPPP Kabupaten Pidie :

- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini III dan Lini IV, serta penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani.
- 2) melakukan pengawasan mutu pupuk; dan
- 3) melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan.

b. Kewajiban KPPP Kabupaten Pidie :

- 1) melakukan koordinasi dengan pengawas dari Instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida;
- 2) melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida kepada pimpinan satuan administrasi pangkal masing-masing;
- 3) melakukan rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP); dan
- 4) menyiapkan bahan laporan kepada Bupati Pidie berdasarkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) Kabupaten Pidie.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah;

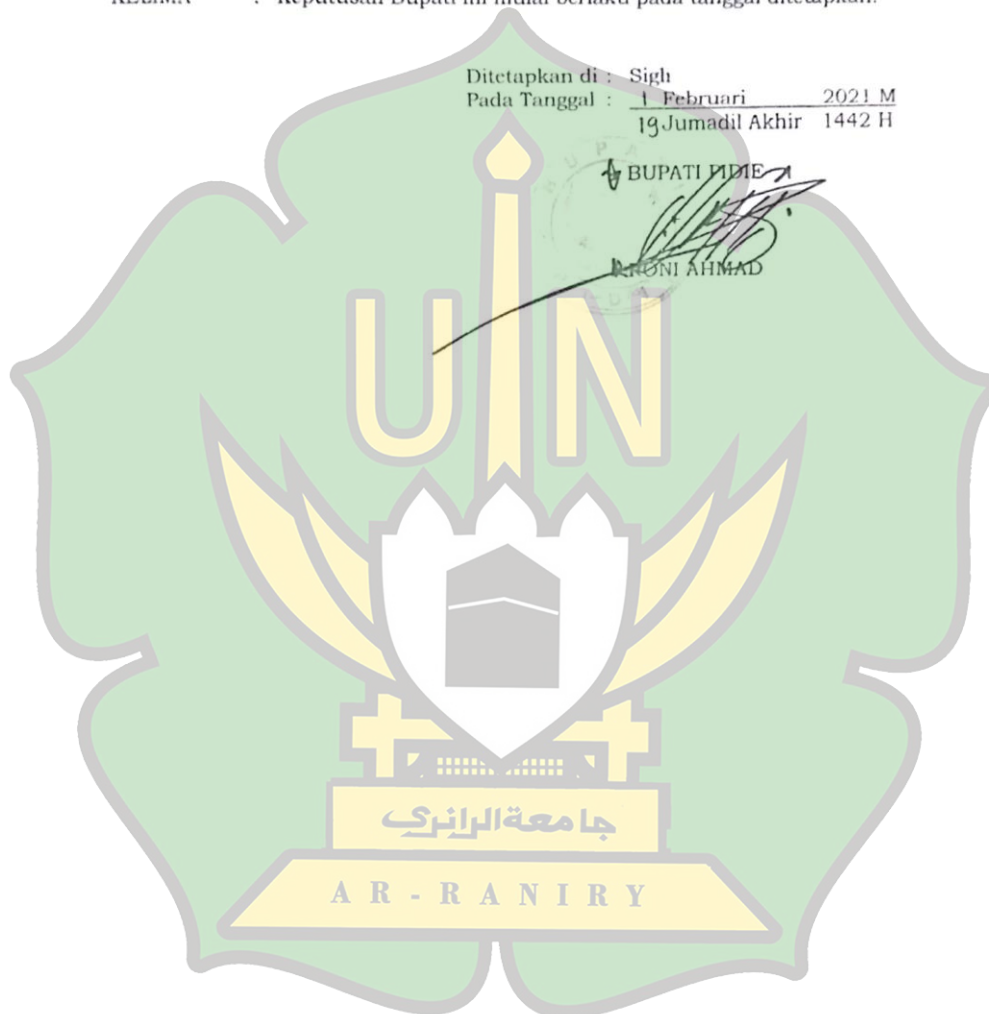
6

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2021 serta sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigh
Pada Tanggal : 1 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE

RIZONI AHMAD



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 520/G9/KEP.07/2021

Tanggal : 1 Februari 2021 M

19 Jumadil Akhir 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA DI
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pidie	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pidie	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Pidie	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Pidie	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kab. Pidie	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie	Anggota
10.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kab. Pidie	Anggota
11.	Unsur Kejaksaan Negeri Pidie	Anggota
12.	Unsur Kepolisian Resort Pidie	Anggota
13.	Unsur Kepolisian Resort Pidie	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Pidie	Anggota
15.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pidie	Anggota
16.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie	Anggota
17.	Kasie Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie	Anggota
18.	Kasubbag Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Pidie	Anggota
19.	Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Pidie	Anggota
20.	Kasubbag Pembinaan BMUD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Pidie	Anggota
21.	Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Pidie	Anggota
22.	Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Pidie	Anggota
23.	Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Pidie	Anggota

AR - RANIRY

BUPATI PIDIE,

R. RANIRY AHMAD

- Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

No. 06
12/11/2021

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Alamat : Jln. Prof. A. Malik Ibrahim Sjahr 24131 Email : gmdal.dotanpangpidie@gmail.com
SIGLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2021
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan/produksi pertanian di Kabupaten Pidie, maka bantuan pupuk bersubsidi sangat diperlukan,
- b. bahwa untuk kelancaran penyediaan serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, perlu ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi per jenis pupuk untuk masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Pidie,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan,
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM/050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani,
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021,
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie,

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor : 820/01/VI/1 Tanggal 01 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kabupaten Pidie Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie ini,

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagai berikut

1. Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi yaitu

- Pupuk Urea	Rp. 2.250,- per kg
- Pupuk SP-36	Rp. 2.400,- per kg
- Pupuk ZA	Rp. 1.700,- per kg
- Pupuk NPK	Rp. 2.300,- per kg
- Pupuk Organik	Rp. 800,- per kg

2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam point (1) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	50 kg,
- Pupuk SP-36	50 kg,
- Pupuk ZA	50 kg,
- Pupuk NPK	50 kg,
- Pupuk Organik	50 kg,

3. Kemasan Pupuk Bersubsidi diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang terhapus yang bertulisan

AR-RANIRY
Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

4. Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna Merah Muda (pink) dan pupuk ZA Bersubsidi berwarna jingga (orange).

KETIGA : Penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh distributor harus sesuai jumlah alokasi dan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, apabila alokasi bulan berjalan tidak mencukupi, dapat menyalurkan alokasi pupuk dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan berikutnya dengan persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sigli
 Pada tanggal : 07 Januari 2021 M
 23 Jumadil Akhir 1441 H

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN PIDIE

Ir. Sofyan
 Pembina Tk.I / NIP. 19641231 199803 1 025

Lampiran Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Bupati Pidie di Sigli,
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh di Banda Aceh,
3. Ketua DPRK Pidie di Sigli,
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie di Sigli,
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie di Sigli,
6. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie di Sigli,
7. Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pidie di Sigli,
8. Direktur PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe,
9. Direktur PT. Petrokimia Gresik di Gresik;
10. Distributor Pupuk dalam Wilayah Kabupaten Pidie masing-masing di Tempat,
11. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan masing-masing di Tempat,
12. Arsip

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

- Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022

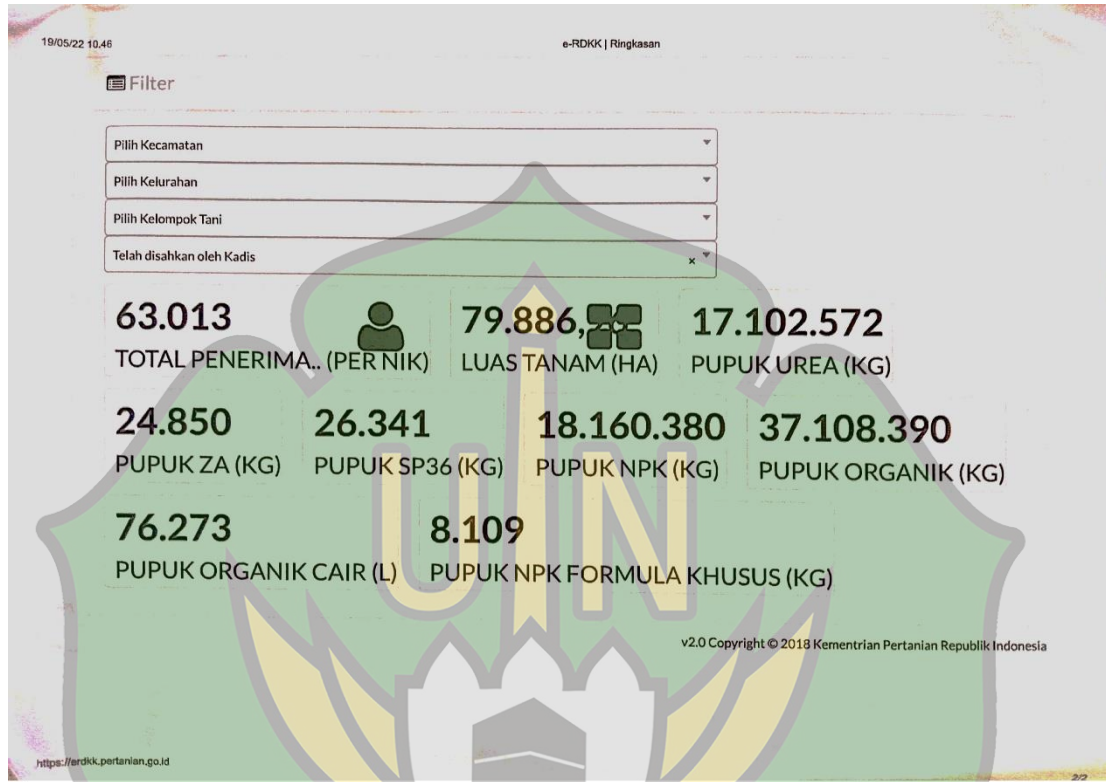
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
Nomor : 520 / 87 / KEP. 10 / 2022
Tanggal : 4 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDSI TAHUN ANGGARAN 2022
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK						
		UREA (Ton)	SP-36 (Ton)	ZA (Ton)	NPK Formula Khusus (Ton)	Organik Cair (Liter)	NPK (Ton)	ORGANIK (Ton)
1	Kota Sigi	7,00	3,00	4,00	-	-	4,00	1,00
2	Padang Tiji	430,00	-	-	8,00	10,00	296,00	40,00
3	Delima	446,00	-	-	-	120,00	258,00	60,00
4	Pidie	532,00	-	-	-	-	301,00	75,00
5	Peukan Baro	350,00	-	-	-	-	222,00	55,00
6	Mutiara	295,00	-	-	-	-	187,00	45,00
7	Mutiara Timur	651,00	0,10	0,05	-	5,00	455,00	100,00
8	Tiro/Truseb	243,00	0,20	0,25	-	-	155,00	10,00
9	Mila	369,00	-	-	-	-	234,00	55,00
10	Sakti	578,00	-	-	-	-	366,00	94,00
11	Keumala	399,00	-	-	-	-	282,00	65,00
12	Glumpang	182,00	1,50	1,10	-	-	210,00	45,00
13	Muaru Tiga	200,00	-	-	-	20,00	126,00	35,00
14	Grong-gorong	111,00	-	-	-	30,00	63,00	15,00
15	Batec	648,00	-	-	-	-	366,00	95,00
16	Kembang Tanjong	561,00	-	-	-	-	258,00	65,00
17	Mane	161,00	13,00	16,50	-	2,00	127,00	25,00
18	Simpang Tiga	500,00	1,20	1,50	-	-	318,00	80,00
19	Indrajaya	462,00	-	-	-	-	229,00	60,00
20	Titeue	230,00	-	-	-	25,00	150,00	35,00
21	Tangse	516,00	1,00	0,60	-	385,00	263,00	80,00
22	Glumpang Baro	349,00	-	-	-	-	160,00	40,00
23	Glumpang Tiga	630,00	-	-	-	3,00	290,00	75,00
JUMLAH		8.850,00	20,00	24,00	8,00	600,00	5.320,00	1.250,00

BUPATI PIDIE
[Signature]
BUPATI ANANDA

- Jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY